



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN HR. SOEBRANTAS PEKANBARU**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat–Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**DISUSUN OLEH**

**META DESNORA**  
**NIM : 11675200697**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : META DESNORA  
**NIM** : 11675200697  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR  
 11 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN  
 PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN  
 HR. SOEBRANTAS PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH :**

Dosen Pembimbing

**Dr. Mahmuzar, M.Hum**  
 NIP. 1976 0426 200701 1 016

**MENGETAHUI :**

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



**Dr. Drs. Muh. Said HM, M.Ag., MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA JURUSAN**  
 Administrasi Negara

**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



NAMA

: Meta Desnora

NIM

: 11675200697

FAKULTAS

: Ekonomi Dan Ilmu Sosial

JUDUL SKRIPSI

: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI JALAN HR. SOEBRANTAS PEKANBARU

HARI/TANGGAL : SENIN, 28 DESEMBER 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

Muslim, S.Sos, M.Si  
NIP. 19820205 201503 1 002

PENGUJI II

Mashuri, MA.  
NIP. 19770721 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN HR. SOEBRANTAS PEKANBARU**

Oleh:

**META DESNORA**  
**NIM: 11675200697**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Penelitian ini memerlukan data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung.*

*Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah sudah berjalan dengan semestinya dan Satpol PP sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban ini menjalankan konsistennya dalam menegakkan Peraturan Daerah. Namun, masih terdapatnya beberapa hambatan yang terjadi seperti Sumber daya manusia dan sumber daya kendaraan dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah yang Peraturan Daerah belum terlaksana dengan maksimal.*

**Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima**

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN HR. SOEBRANTAS PEKANBARU”**. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
2. Bapak Dr. Drs. H.Muh. Said HM, M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ratna Dewi, S, sos selaku Penasehat Akademik penulis yang memberikan arahan, masukan serta dorongan pada saat penulis pertama kali masuk kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada Camat Tambang serta seluruh Pegawai Kantor Camat Tambang dan Kepala Desa Aursati serta seluruh Staf Kantor Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang telah membantu penulis dengan informasi yang di butuhkan oleh penulis.
8. Kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ibunda Ratna yang selalu senantiasa membimbing, menyemangati, memberi kasih sayang yang tak terhingga dan mendo'akan penulis agar di beri kelancaran dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada Saudara Kandung penulis, Alyani Rahma Putri, ST sebagai kakak kandung yang senantiasa memberi semangat dan mendo'akan penulis selama perkuliahan.
10. Teman dekat yang selalu menyemangati Calvin Melkias Rawung dan sahabat-sahabat seperjuangan Ayu, Nadia, Lilis dan teman-teman Jurusan Administrasi Negara angkatan 2016 terkhusus Lokal E dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Pekanbaru 2020

Penulis,

**META DESNORA**  
**NIM. 11675200697**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Kegunaan Penelitian .....	8
1.5    Sistemematika Penulis .....	9
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
2.1    Kebijakan Publik.....	11
2.2    Implementasi Kebijakan .....	13
2.3    Pembinaan dan Penataan .....	21
2.4    Satuan Polisi Pamong Praja .....	24
2.5    Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	25
2.6    Trotoar .....	28
2.7    Bahu Jalan.....	28
2.8    Penelitian Terdahulu .....	29
2.9    Pandangan Islam tentang Ketertiban Umum .....	32
2.10   Defini Konsep .....	34
2.11   Konsep Operasional .....	36
2.12   Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1    Jenis Penelitian .....	38
3.2    Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.3    Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3.1   Data Primer .....	38

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

3.3.2 Data Sekunder.....	39
3.4 Informan Penelitian.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.6 Analisis Data.....	41

## GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Kota Pekanbaru.....	42
4.1.1 Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau.....	45
4.2 Keadaan Umum Kota Pekanbaru.....	46
4.2.1 Keadaan Geografis .....	46
4.3 Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	47
4.3.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru .....	48
4.3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ..	48
4.3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ..	49
4.4 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru.....	56
4.4.1 Latar Belakang Satuan Polisi Pamong Praja .....	56
4.4.2 Landasan Hukum.....	57
4.4.3 Maksud dan Tujuan .....	58
4.4.4 Visi dan Misi SATPOL PP Kota Pekanbaru .....	58
4.4.5 Tugas Dari Masing – masing.....	61

## BAB V

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.....	67
5.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru .....	68



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Kesimpulan .....	98
6.2	Saran .....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Pekanbaru .....	4
Tabel 1.2	Jumlah Frekuensi Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satpo PP Di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Dahulu .....	29
Tabel 5.1	Tingkat pendidikan Anggota Personil Satpol PP Pekanbaru ...	82
Tabel 5.2	Status Kepegawaian Anggota Personil Satpol PP Pekanbaru ..	84



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas .....	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Peneliti .....	37
Gambar 5.1	Satpol PP sedang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda .....	75
Gambar 5.2	Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP .....	77
Gambar 5.3	Satpol PP sedang melakukan patroli di Jalan HR. Soebrantas.....	78
Gambar 5.4	Mobil Pick Up Satpol PP Kota Pekanbaru .....	85
Gambar 5.5	Mobil Truk Satpol PP.....	86
Gambar 5.6	Mobil krangkeng Satpol PP .....	86
Gambar 5.7	Kumpulan Gambar Satpol PP Kota Pekanbaru Saat Sedang Melakukan Penertiban .....	94



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang pasti mendambakan kota yang bersih, tertata rapi, dan tentram. Lingkungan yang bersih tanpa sampah berserakan, tata kota dengan mengutamakan penghijauan dan ramah lingkungan, serta kemacetan lalu lintas. Banyak pemerintah daerah yang berusaha mewujudkan hal tersebut dengan berbagai alasan seperti kenyamanan, kebersihan, dan ketertiban. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru pada masa silam merupakan sebuah dusun kecil yang bernama Payung Sekaki yang terletak di Pinggiran sungai Siak yang dibuka oleh suku Senapelan, yang dikenal juga dengan nama Dusun Senapelan. Untuk meramaikan Senapelan yang sempat terabaikan akibat perubahan kekuasaan, Raja kemudian memindahkan lokasi pasar yang lama ke tempat baru, sehingga terciptalah pasar baru, yang identik dengan sebutan “ pekan baru “ Daerah itulah yang dikenal dengan nama Pekanbaru sekarang.

Sebagai ibukota dari Provinsi Riau, Pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota pusat perdagangan, industri dan jasa. Saat ini telah banyak dibangun sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik itu pada sektor ekonomi ataupun sektor lainnya di Provinsi Riau ini, khususnya Kota Pekanbaru. Secara umum permasalahan pokok lingkungan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru yang perlu dapat perhatian adalah besarnya arus urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dengan segala implikasinya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan problem penduduk seperti kesediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan perumahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Basis mata pencarian penduduk Pekanbaru meliputi sektor industri, pertambangan, jasa transportasi dan sektor informal yang komposisinya mencapai lebih dari 80 persen dari struktur perekonomian Kota Pekanbaru.

Perkembangan Kota Pekanbaru yang sekarang berkembang dengan sangat pesat. Banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang timbul akibat arus urbanisasi ini diantaranya menjamurnya masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor informal, bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan serta perubahannya tata ruang kota. Kondisi ini tentunya dapat menghambat tercapainya visi Kota Pekanbaru yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.

Pekerjaan masyarakat pada sektor informal ini sebenarnya dapat dijadikan potensi pembangunan daerah. Salah satu potensi pembangunan daerah ini tercakup didalamnya pedagang kaki lima (PKL) yang perlu mendapatkan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan didalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun tidak dapat dipungkiri keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat hampir di setiap sudut Kota Pekanbaru ini, bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan Kota Pekanbaru. Sebagian orang mungkin ada menganggap mereka sebagai kelompok yang sangat mengganggu aktivitas mereka, merusak kebersihan atau keindahan pemandangan jalan.

Di satu pihak para pedagang yang menggelar dagangan mereka disekitar bahu-bahu jalan, trotoar ataupun pada area-area yang tidak diperbolehkan berjualan. Menurut (Pajar Pangestu 2017:05) yaitu Pedagang Kaki Lima tidak pernah terhentinya timbul seiring dengan pertumbuhan penduduk. dan pada penelitian (Rolhen Bayu Saputra 2014) Hal ini membawa akibat positif dan negatif memang kadangkala banyak menimbulkan kerugian bagi pengguna fasilitas umum lainnya karena dapat memberi hambatan bagi mereka, misalnya para penjalan kaki yang ingin menggunakan trotoar untuk berjalan. Namun disisi lain keberadaan pedagang kaki lima (PKL) ini juga memiliki efek yang positif jika mereka dibina dan ditata dengan baik, sehingga kualitasnya meningkat dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah karena sektor ini cukup potensial jika dibina dengan baik. Pentingnya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) antara lain adalah menciptakan peluang kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mendukung berkembangnya semangat kewirausahaan.

Pedagang di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru mulai tersedia pada pagi hari sampai malam hari. pedagang di jalan HR. Soebrantas cukup beragam yaitu terdiri dari kuliner (makanan dan minuman), pedagang pakaian, pedagang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

aneka gorengan, pedagang buah-buahan, pedang stiker HP, pedagang Bahan Bakar Minyak, pedagang sandal, pedagang mainan. Pedagang tersebut berjualan menggunakan trotoar dan bahu jalam di Jalan HR. Soebrantas, permasalahan lainnya adalah aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dapat mengurangi ketertiban, kenyamanan, keindahan dan kebersihan Kota. Selain itu juga mengganggu kelancaran lalu lintas karena pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan sampai menempati badan jalan. Oleh sebab itu pemerintah Kota Pekanbaru menurut penelitian (Fakrurrazi 2013:04) akan berusaha untuk melakukan penataan dengan sebaiknya melalui pada Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pedagang kaki lima (PKL) tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota. Tetapi realitanya, pedagang yang berjualan disepanjang Jalan HR. Soebrantas melanggar Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan tetap bertahan sampai sekarang. Berikut tabel jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Hr.

Soebrantas Pekanbaru :

**Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2018 di Jalan HR. Soebrantas Pekanbaru**

No.	Lokasi	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Jl. Hr. Soebrantas	April	90
		Mei	101
		Juni	150
		Juli	112
		Agustus	128
		September	99
		Oktober	198
		JUMLAH	879

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru,2020



**Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2019 di Jalan HR. Soebrantas Pekanbaru**

No.	Lokasi	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Jl. Hr. Soebrantas	April	126
		Mei	221
		Juni	201
		Juli	112
		Agustus	97
		September	226
		Oktober	248
		JUMLAH	1.231

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2020

**Tabel 1.3 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 di Jalan HR. Soebrantas Pekanbaru**

No.	Lokasi	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Jl. Hr. Soebrantas	April	256
		Mei	266
		Juni	211
		Juli	217
		Agustus	227
		September	235
		Oktober	248
		JUMLAH	1.684

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel 1.1, 1.2 dan tabel 1.3 terdapat pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan menepati trotoar dan bahu jalan di Jalan Hr Soebrantas dari tahun ke tahun Pedagang kaki Lima (PKL) terjadi peningkatan. Seharusnya trotoar yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dimana pejalan kaki berhak atas kesediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar sedangkan pada Jalan Hr. Soebrantas tidak menjalankan sebagai mana mestinya fungsi trotoar dan mengakibatkan kemacetan. Dan pada fungsi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahu jalan digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran atau polisi dan pada Jalan Hr. Soebrantas fungsinya tidak digunakan pada mestinya dan mengakibatkan kendaraan darurat tidak bisa menggunakan bahu jalan tersebut dan Jalan Hr. Soebrantas merupakan jalan lintas yang melewati Rumah Sakit Jiwa Tampan, Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jalan tersebut jalan lintas menuju Sumatra Barat. Artinya zona tersebut merupakan jalan yang padat lalu lintas sehingga sangat rentan menimbulkan kemacetan.

Pada isi jurnal (Nurul Fitria 2016:03) menjadi sorotan untuk wajah Kota Pekanbaru yaitu berubahnya tata ruang Kota akibat bermunculannya Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa setiap pedagang kaki lima (PKL) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan dan keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.

Realita di lapangan masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak mematuhi Perda tersebut dan pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan, berikut hasil dokumentasi penulis setelah observasi dilapangan :

UIN SUSKA RIAU

**Gambar 1.1 : Pedagang Kaki Lima di jalan H.R Soebrantas**



*Sumber : Foto Hasil Observasi Lapangan 2020*

Dari gambar diatas terlihat Pedagang Kaki Lima yang menggunakan bahu jalan terdiri dari pedagang buah-buahan, makanan dan minuman. Maka dari itu pemerintah Untuk mewujudkan ketertiban Pedagang Kaki Lima tentunya (Satpol PP) dalam penelitian (Febra Arnita Nasution 2017:02) harus melakukan kegiatan penertiban secara berkala dan perlu memberikan perhatian khususnya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Penertiban secara berkala akan memberikan hasil yang maksimal untuk mencegah kembalinya para pedagang berjualan ditempat yang sudah ditertibkan. Berikut data jumlah frekuensi penertiban yang dilakukan oleh satpol PP di Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru 2019 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tabel 1.2 Jumlah Frekuensi Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satpo PP Di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru**

NO	Bulan	Frekuensi Penertiban
1	Januari	1 Kali
2	Februari	2 Kali
3	Maret	-
4	April	1 Kali
5	Mei	1 Kali
6	Juni	-
7	Juli	1 Kali
8	Agustus	1 Kali
9	September	2 Kali
10	Oktober	-
11	November	1 Kali
<b>Jumlah</b>		<b>10 Kali</b>

*Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, 2020*

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa frekuensi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam Tahun 2019 sangat terlalu jarang, dan penertiban yang tidak dilakukan yaitu pada bulan Maret, Juni dan Oktober. Sehingga penertiban pada kawasan tersebut kurang dipatuhi oleh Pedagang Kaki lima (PKL).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Bahu Jalan dan Trotoar di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah serta mengacu pada fenomena diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Bahu Jalan dan Trotoar Di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada bahu jalan dan trotoar Di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada bahu jalan dan trotoar Di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada bahu jalan dan trotoar Di Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk diri sendiri sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Jurusan Administrasi Negara Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk bahan informasi atau bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempertimbangkan pembuatan kebijakan, agar pedagang kaki lima (PKL) tersusun dengan rapi.
3. Untuk Menambah Referensi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### 1.5 Sistemematika Penulis

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti teori Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pembinaan dan Penataan, Pedagang Kaki Lima, Trotoar, Bahu Jalan, Penelitian Terdahulu, Pandang syariat islam tentang ketertiban umum, Definisi Konsep, Konsep Operasional, Kerangka Pikiran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan informan penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : GAMBAR UMUR LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari sejarah berdirinya Kota Pekanbaru, keadaan umum Kota Pekanbaru, sejarah Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulisan akan menguraikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, merupakan bab penutup, dimana pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Sebagai konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. Sebagai contoh, James Anderson memberi makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang kegiatan tertentu (purwanto,2012:1) pengertian diatas sangat luas dan bisa diartikan bermacam-macam, misal sang “aktor” dapat berupa individu atas organisasi, dapat pemerintah maupun non pemerintah. Demikian pula dengan istilah “kegiatan tertentu” bisa diartikan kegiatan administrative, politis, ekonomi, dan lain-lain. Disamping itu, bentuk kegiatannya pun luas dan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program dan sebagainya, dengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor.

Menurut ibrahim (2004 : 2) kebijakan adalah memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Selain itu Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt juga berpendapat tentang definisi kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. (Jones, 1991 : 47). James Anderson juga memberikan pengertian atas kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2014:6)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Willy N Dunn dalam (Syafie, 2006:106) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Disamping konsep diatas, dikenal pula konsep analisa kebijakan. Thomas R. Dye (Purwanto, 2012:1) menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik. Analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan itu dan apa konsekuensi dari apa yang telah dilakukan pemerintah. Analisis kebijakan memberi dorongan kepada kita untuk melontarkan isu yang krisis terhadap pemerintah dengan memanfaatkan perangkat dan penelitian yang sistematis. Karena analisis kebijakan menggunakan epistemologi ilmu, maka diartikan pula sebagai respon manusia yang menuntut agar ada relevansi antara ilmu sosial dengan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Menurut Dye (Purwanto, 2012:2) ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan, yaitu:

1. Mendeskripsikan kebijakan publik, dengan demikian dapat diketahui apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pertahanan, Negara, pendidikan, dan hak-hak sipil, energi, perpajakan, dan sebagainya.
2. Mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah melancarkan kebijakna tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

3. Meneliti akibat kebijakan terhadap masyarakat.
4. Evaluasi kebijakan.
5. Perubahan kebijakan.
6. Terminasi kebijakan.

Konsep lainnya adalah penelitian kebijakan (*policy research*). Ann Majchzak (Purwanto, 2012:2) menyatakan bahwa penelitian kebijakan adalah proses pelaksanaan riset atau analisis terhadap permasalahan sosial yang fundamental dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada *policy maker* agar dapat melakukan langkah-langkah pragmatis guna memecahkan masalah tersebut.

Dengan demikian penelitian kebijakan berbeda dengan analisis kebijakan. Analisis kebijakan, sebagaimana dijelaskan di atas, pada hakekatnya adalah studi tentang proses pembuatan kebijakan. Focus kepentingan kepada :

1. Proses pengadopsian kebijakan.
2. Efek dari kebijakan yang diadopsi tersebut.
3. Bersifat deskriptif dan eksplanatif.

Sedangkan penelitian kebijakan fokus kepentingannya pada :

1. Identifikasi masalah-masalah kebijakan.
2. Pemberian rekomendasi pragmatis kepada pembuat kebijakan.
3. Bersifat preskriptif.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Setelah proses legislasi kebijaka selesai, maka kebijakan public diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya mungkin akan mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan mungkin akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinegasikan. Menurut pendapat Lester dan Sewart (Purwanto, 2012 : 97), implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administrative. James Anderson (Purwanto, 2012:97) menyatakan bahwa implementasi kebijakan / program merupakan bagian dari administrative process (proses administrasi). Proses administrasi sebagaimana diistilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan system administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Menurut Moenir (2004 : 25) implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan / seseorang dalam organisasi. Kemudian menurut Mezmanian implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. (Nugroho, 2008 : 477)

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penerapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2007:144).

Effendi (2000 : 39) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasi sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang tujuan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas dan dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program hasil-hasi yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para demokrat, yang dimaksud untuk membuat program perjalanan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tahan, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program.
3. Badan-badan pelaksana memberi keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Menurut Grindle (Winarno, 2007:146) juga memberikan pandanganya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implemen adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana – diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah kedalam proyek-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proyek yang individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang diterapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan, dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep-konsep yang berbeda, walaupun tidak berarti bahwa konsep-konsep ini tidak saling terhubung satu sama lain. Studi tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan publik, seperti dikemukakan Van Meter dan Van Horn mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Edwards (Winarno, 2008:174) variabel tunggal dalam proses Implementasi, variabel-variabel ini memengaruhi proses Implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Yaitu keberhasilan Implementasi kebijakan masyarakat agar Implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi Implementasi.alat ukur yang dipakai dalam komunikasi yaitu :

- a. Transmisi adalah Penyaluran komunikasi dengan baik
- b. Kejelasan adalah kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, diskomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
- c. Konsisten adalah suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan..

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya financial.

- a. Staf adalah jumlah staf harus memadai dan berkopetensi dalam bidangnya
- b. Informasi adalah informasi cara melaksanakan kebijakan dan informasi data kepatuhan dari para pelaksana
- c. Wewenang adalah harus bersifat formal agar perintah dapat terlaksana secara efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fasilitas adalah fasilitas dan prasarana memadai.

3. Disposisi atau Sikap

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

- a. Pengangkatan birokrasi adalah pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan.
- b. Insentif adalah mengawasi para pelaksana dalam memanipulasi insentif.

4. Struktur birokrasi

Yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar.

- a. Kerjasama banyak pihak adalah dalam melaksanakan kebijakan didukung dari berbagai pihak dan berkerjasama dari pihak pemerintah maupun swasta.

Wahap (2004 : 49) mengemukakan ada tiga sudut pandang dalam proses

implementasi yaitu :

1. Pemeriksa kebijakan
2. Pejabat - pejabat pelaksana di lapangan
3. Aktor – aktor perorangan diluar badan – badan pemerintah kepada siapa program pemerintah itu ditujukan, yaitu kelompok sasaran (target group).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiga sudut pandang tersebut tentunya sangat mempengaruhi proses implementasi. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan implementasi kebijakan diperlukan tahap – tahap implementasi kebijakan, Islamy (1997:102–106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat jalan sendiri (self – executing), yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap negara lain.
2. Bersifat tidak berjalan sendiri (non self – executing) yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Menurut Mezmanian dan Sabatier (Dun, 2003:8), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi :

1. Karakteristik masalah

Masalah publik memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesilitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Karakteristik kebijakan

Memiliki beberapa karakteristik kebijakan yaitu, kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi Sumber Daya financial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya dukungan antara berbagai institusi pelaksana, tingkat komitmen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatus terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok – kelompok luar untuk berpartisipasi dalam Implementasi kebijakan.

### 3. Variabel Lingkungan

Memiliki beberapa karakteristik yaitu, kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan sikap dari kelompok pemilih. Dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan setelah itu mengidentifikasi faktor – faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses Implementasinya dan lingkungan kebijakan yang memengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.

### 2.3 Pembinaan dan Penataan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

No	BAB	Pasal	Ayat
1	1) Tempat Usaha	2	1) Tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, penertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
		3	1) Setiap pedagang kaki lima (PKL) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	BAB	Pasal	Ayat
1			2) Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana maksud dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.
2	2) Perizinan	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari Kepala Daerah</li> <li>2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.</li> <li>3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.</li> <li>4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.</li> <li>5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin</li> <li>b) Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (PKL)</li> <li>c) Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> </ol> </li> <li>6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi</li> </ol>
		5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 6 (Enam bulan)</li> <li>2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah.</li> <li>3) Biaya pembuatan tanda izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan</li> </ol>

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	BAB	Pasal	Ayat
Hak cipta milik UIN Suska Riau		6	<p>kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki izin diberikan peringatan 1 kali.</li> <li>2) Apabila pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak menyita terhadap barang dagangannya dan alat yang digunakan.</li> <li>3) Pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah.</li> <li>4) Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.</li> <li>5) Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kebersihan dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkan.</li> </ol>
	(3) Pembinaan	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL) Walikota berkewajiban memberi pembinaan berupa bimbingan atau penyuluhan.</li> <li>2) Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.</li> </ol>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	BAB	Pasal	Ayat
4	(4) Pengawasan	8	Pengawasan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk .
5	(5) Ketentuan Pidana	9	1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6(Enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## 2.4 Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pengelolaan urusan Kepemerintahan Daerah, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban Kota. Pemerintah Kota menunjuk salah satu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa: “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau dibentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis pemerintah Kota Pekanbaru yang menegakkan peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maka kondisi ketentraman dan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

## 2.5 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki lima (PKL) menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948, pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar lima kaki atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (dalam Widodo,2000:27).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Mc. Gee dan Yeung (1977:25) memberikan pengertian pedagang kaki lima (PKL) sama dengan hawker (barang jajakan), yang didefinisikan sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang public, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

Latar belakang seseorang menjadi pedagang kaki lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah :

1. Terpaksa
2. Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat criminal lain
3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua
4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan
5. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan sebagaimana yang dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Dari pengertian tersebut diatas yang dimaksud dengan pedagang kaki lima (PKL) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagang atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama diatas trotoar atau sebagian badan jalan). Dengan tidak mempunyai legalitas formal dan kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang ditempatnya ruangan kosong di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya.

Adapun jenis dagangan pedagang kaki lima (PKL) menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:82-83), jenis dagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas.

Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis perdagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima (PKL) dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yaitu:

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buahbuahan dan sayur-sayuran
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.6

### Trotoar

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Trotoar merupakan hak pejalan kaki, sama seperti tempat penyebrangan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 144 menyebutkan trotoar juga bisa digunakan untuk pesepeda bila tidak tersedia jalur sepeda.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 dikatakan definisi trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Jadi, trotoar adalah hak pejalan kaki maka aktivitas selain pejalan kaki maka aktivitas selain berjalan harusnya tidak boleh dilakukan, misalnya jadi tempat parkir kendaraan, lalu lintas darurat sepeda motor, berjualan. Pengudi atau pedagang seharusnya menyadari mengeksploitasi trotoar adalah perampasan hak pejalan kaki.

## 2.7

### Bahu Jalan

Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai :

1. Ruang untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang berhenti karena mengemudi ingin membicarakan jurusan yang akan dibuka, atau untuk diambil.
2. Ruangan untuk menghindarkan diri dari saat darurat, sehingga dapat mencegah kecelakaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Memberikan kelegaan pada pengemudi, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang didukung.
4. Ruangan pembantu pada saat diadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan (untuk tempat penempatan alat-alat dan penimbunan bahan matrial)
5. Memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan dari arah samping.
6. Ruangan untuk lintasan kendaraan-kendaraan patroli, ambulans, yang sangat dibutuhkan pada saat darurat seperti menghabiskan kecelakaan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Dahulu

No.	Nama Peneliti	Judul (Tahun)	Fokus Penelitian	Telaah/Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Dwi Hendra Saputra	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan H. Arif Parit 11 Kecamatan tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir (2014)	fokus penelitiannya yaitu pada bagaimana implementasi Perda No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7 ayat (1) huruf G, pada setiap jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orng dilarang untuk : menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan	Pelaksanaan Perda No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7 ayat (1) huruf G belum maksimal, terbukti dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang badan jalan H., Arif Parit 11 Tembilahan Hulu.	1)Tempat penelitian, disini peneliti dilakukan di jalan H. Arif Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu. Sedangkan saya melakukan penelitian di kota Pekanbaru di Jalan Hr. Soebrantas. 2)Fokus, penelitian pada penelitian ini berfokus

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul (Tahun)</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Telaah/Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Dengan Penelitian Ini</b>
			barang-barang dalam bentuk apapun.		pada Implementasi Perda No. 21 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) huruf G sedangkan saya berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pedagang kaki lima (PKL)
2.	Bonni Edwandar	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Pekanbaru) Tahun 2017.	Fokus Penelitiannya yaitu pada efektivitas kinerja Pegawai Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru	Pelaksanaan efektivitas kinerja pegawai polisi pamong praja belum memadai karena hal ini diketahui berdasarkan kegiatan Satuan Pamong praja, selama ini Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan patroli keliling.	3)penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru di Pasar Kodim, penelitian ini berfokus kepada efektivitas polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima sedangkan penelitian saya berfokus pada Implementasi Peratura Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pedagang kaki lima (PKL) di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul (Tahun)</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Telaah/Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Dengan Penelitian Ini</b>
3	Septi Satriani	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Malam di Kota Payakumbuh. Pada Tahun 2016.	Fokus penelitiannya yaitu pada bagaimana Analisis Implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Malam di Kota Payakumbuh	Pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Malam di Kota Payakumbuh belum maksimal, dengan masih banyak pedagang kaki lima atau pedagang malam yang berjualan di Kota Payakumbuh	Pekanbaru. penelitian ini berfokus kepada pedagang kaki lima dan pedagang malam di Kota payakumbuh sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada pedagang kaki lima yang berada di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.
4	Yosi Safitri	Implementasi Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Di Pasar Senapelan (Pasar Kodim) Tahun 2017	Fokus penelitian ini pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima (PKL)	Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim belum maksimal, dengan masih banyak tertata pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Pasar Kodim.	Penelitian ini melakukan penelitian di Pasar Kodim sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada bahu jalan dan trotoar di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.





## 2.9 Pandangan Islam tentang Ketertiban Umum

Q.S An-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya (Nya), dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas menyuruh untuk mematuhi hukum-hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan hukum Rasul di dalam kehidupan. Disamping itu juga harus mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dipatuhi untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Ibnu Abbas ([www.brainly.co.id](http://www.brainly.co.id)) dari ayat tersebut dapat juga kita petik pelajaran sebagai berikut :

1. Taat kepada Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) bersifat mutlak, selama Ulil Amri tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah SWT
2. Rasul memiliki dua kedudukan. Pertama, menjelaskan hukum Tuhan dan menunaikan risalahnya. Kedua, mengelola urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan mazhab Islam adalah merujuk kepada Alquran dan Sunnah Rasul yang diterima semua orang
4. Masyarakat haruslah menerima pemerintah Islam dan mendukung para pimpinan yang adil

Pedagang kaki lima adalah orang yang menawarkan barang dagangan di trotoar sebenarnya sarana umum bagi pejalan kaki tidak hanya menggunakan trotoar sebagai tempat usaha pedagang kaki lima ini juga merusak fasilitas yang ada dalam hukum islam terdapat larangan membuat kerusakan dimuka bumi.

Surat Ar Ruum (30) ayat 41-42 tentang larangan membuat kerusakan dimuka bumi.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah: akankah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (QS Ar Ruum:41-42)

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagai manusia terhadap alam dalam menjerakkan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang yang tak karuan pada sekarang ini serta udara yang dirasakan saat ini sudah tercemar. Itu semua adalah perbuatan manusia, yang merugikan manusia dan makhluk lainnya. Islam mengajarkan umat manusia senantiasa menjaga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

lingkungan dengan baik. Untuk melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya tehabilitasi berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu dilestarikan.

Surat Al-An'am ayat 135 yang berbunyi :

قُلْ يَتَقَوِّمُوا أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ  
عَنْقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: “katakanlah: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya manusia yang tidak berusaha secara bersungguh-sungguh adalah termasuk orang yang zalim, karena Allah telah menjadikan kehidupan didunia ini sebagai lahan mencari kebahagiaan. Orang-orang yang zalim seperti ini divonis oleh Allah sebagai orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan, sebagai balasan kezaliman yang diperbuatnya.

### 2.10 Defini Konsep

Konsep yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (dalam Asnel Wati,2014,36). Konsep juga merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci
2. Peraturan adalah tatanan atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur
3. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 adalah Peraturan yang mengatur tentang penataan dan pembinaan dari pedagang kaki lima (PKL)
5. Penataan adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang
6. Pembinaan adalah suatu usaha , tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik
7. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan
8. Pedagang Kaki Lima adalah sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang public, terutama dipinggir jalan dan trotoar.
9. Bahu Jalan adalah bagian tepi yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat dikala jalam sedang mengalami kemacetan.



10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

## 2.11 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah pengertian variabel (yang diungkapkan dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, serta praktis, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian/objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menulis pakai sebagai konsep operasional adalah teori Edward III, yaitu:

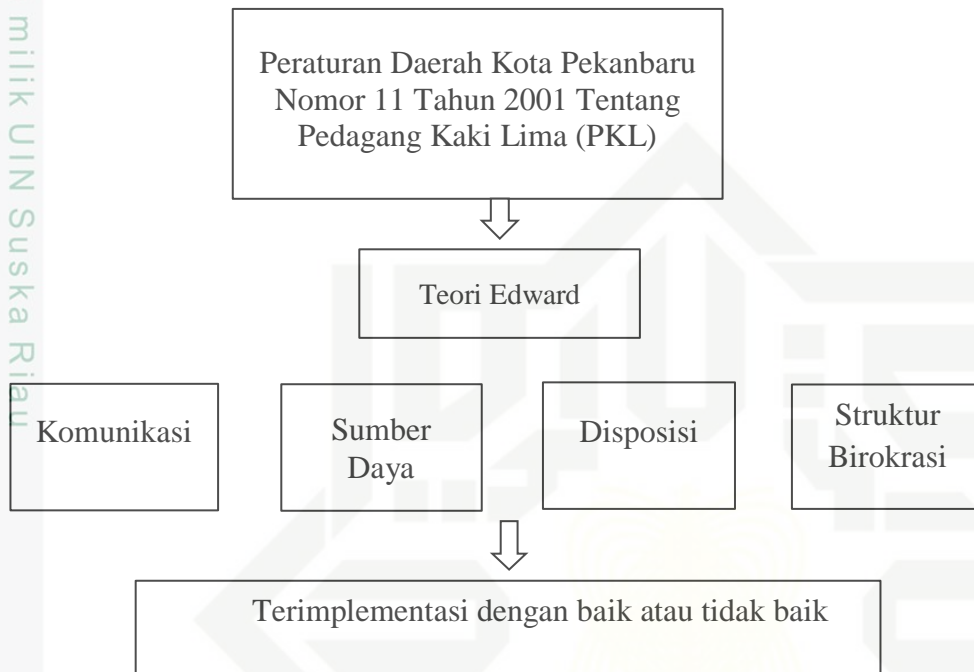
Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsisten
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Disposisi (sikap)	a. Pengangkatan birokrasi b. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Standart Operasional prosedur (SOP) b. Fragmentasi

Sumber : Edward (Winarno, 2008:174) tentang Variabel yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Peneliti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata-kata. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana implementasi peraturan daerah No 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) pada bahu jalan dan trotoar di Jalan HR. Soebrantas.

#### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Sejalan dengan rencana tujuan yang diinginkan, maka dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini di Kota Pekanbaru Jalan HR. Soebrantas dari tanggal 07 Oktober 2019 hingga selesai.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain, berupa :

##### **3.3.1 Data Primer**

yaitu data pertama yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dari pihak pertama dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas, dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel yaitu :

- a) Pedagang yang beraktivitas di bahu jalan HR. Soebrantas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pembeli yang berbelanja di kawasan bahu jalan HR. Soebrantas
- c) Para aparat bagian tata kelolaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima selaku yang mengelola dan bertanggung jawab atas tata kelola yang ada di Kota Pekanbaru dan para Satpol PP yang menangani bagian keamanan dan ketertiban

### 3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber lain dengan cara tidak langsung melainkan dari laporan-laporan yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian (Sugiyono,2011), Misalnya dengan menjalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang telah didokumentasikan oleh kantor/instansi/terkait, antara lain :

- a. Gambar wilayah Kota Pekanbaru
- b. Kawasan Pedagang Kaki Lima jalan HR. Soebrantas
- c. Perundang-undangan yang berkaitan mengenai Pedagang Kaki Lima
- d. Susunan organisasi dan uraian Tugas Instansi.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti mengetahui tentang permasalahan dan mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas.



Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Seksi bagian di instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (1 orang)
- b. Kepala bidang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (1 orang)
- c. Pedagang (15 orang)
- d. Pembeli (5 orang)

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi pedagang kaki lima. Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif juga direkam dengan kamera handphone.
2. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan, misalnya jumlah Pedagang Kaki Lima yang dapat diperoleh dari Dinas atau Instansi yang terkait.
3. Wawancara dengan pelaku yang terlibat yaitu Kepala Seksi bagian kebersihan, ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam pengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Satpol PP dalam menangani penertiban langsung kepada Pedagang Kaki Lima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode penulisan deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian dan menggambarkan faktor-fakta lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan maksud penelitian. Kemudian direkduksi dengan memilih hal-hal yang penting. Pada tahap ini peneliti memilih informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direkduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Berdirinya Kota Pekanbaru

Menurut versi sejarah, pada masa silam kota ini hanya berupa dusun kecil yang dikenal dengan sebutan Dusun senapelan, yang dikepalai oleh seorang Batin (kepala dusun). Dalam perkembangannya, Dusun Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung sekaki, yang terletak ditepi Muara Sungai Siak. Perkembangan Dusun Senapelan ini erat kaitannya dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada masa itu, raja Siak Sri Indrapura yang keempat, <sup>Sultan</sup> Abdul Jalil Alamuddin Syah, Bergelar Tengku Alam (1766-1780 M.), menetapkan di Senapelan, dan kemudian membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan Dusun Senapelan (di sekitar mesjid Raya Pekanbaru sekarang). Tidak berapa lama menetap di sana, Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah kemudian membangun sebuah pekan (pasar) di Senapelan, tetapi pekan itu tidak berkembang. Usaha yang telah dirintisnya tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya, Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M. Berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri senapelan diganti namanya menjadi Pekanbaru. Sejak saat itu, setiap tanggal 23 Juni ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Mulai saat itu pula, sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan Pekanbaru. Sejalan dengan perkembangannya, kini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekan Baharu lebih populer disebut dengan sebutan Kota Pekanbaru, dan oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau. Jauh sebelum Sultan Abdul Djalil Alamuddin Syah, putra Sultan Abdul Djalil Rahmat Syah memindahkan pusat perdagangan yang cukup ramai pada saat itu. Kedua daerah ini tempat berkumpulnya para pedagang dari pedalaman Sumatra membawa hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang. Oleh para pedagang, hasil pertanian, hasil hutan dan hasil tambang tersebut mereka bawa ke Singapura dan malaka menggunakan perahu. Untuk jalur perdagangan Sungai Kampar, pusat perdagangannya terletak di Teratak Buluh. Sedangkan pusat perdagangan jalur sungai siak terletak di Petapahan. Perdagangan jalur sungai Kampar kondisinya kurang aman, perahu pedagang sering hancur dan karam dihantam gelombang (Bono) di Kuala Kampar dan sering juga terjadi perampokan yang dilakukan oleh para lanun. Sedangkan Sungai Siak termasuk jalur perdagangan yang cukup aman.

Senapelan ketika itu hanya sebuah dusun kecil yang letaknya di kuala Sungai Pelan, hanya dihuni oleh dua atau tiga buah rumah saja (sekarang tepatnya di bawah jembatan Siak I). Pada saat itu di sepanjang Sungai Siak, mulai dari kuala Tapung sampai ke Kuala Sungai Siak (Sungai Apit) sudah ada kehidupan, hanya pada saat itu rumah-rumah penduduk jaraknya sangat berjauhan dari satu rumah kerumah lainnya. Ketika itu belum ada tradisi dan kebudayaan, yang hanya bahasa, sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang tinggal di pinggir Singai Siak.

Bahasa sehari-hari yang mereka pakai adalah bahasa Siak, bahasa Gasip, bahasa Perawang dan bahasa Tapung, karena orang-orang inilah yang lalu lalang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melintas Sungai Siak. Pada saat itu pengaruh bahasa Minang, bahasa pangkalan Kota Baru dan bahasa kampar belum masuk bahasa orang-orang yang hidup di sepanjang sungai siak. Setelah Sultan Abdul Djalil Alamudin Syah memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Siak dari Sungai Mempura ke Senapelan, Pembesar-pembesar kerajaan serta orang-orang dalam kerajaan serta keluarganya ikut pindah ke Senapelan. Dan pada saat itulah tradisi serta budaya, bahasa sehari-hari terbawa pindah ke Senapelan. Di Senapelan Sultan membangun istana (istana tersebut tidak terlihat lagi karena terbuat dari kayu, makanya mesjid tersebut tidak bisa kita lihat lagi sekarang ini. Dari dasar mesjid inilah menjadi cikal bakal mesjid Raya Pekanbaru di Pasar Bawah sekarang ini.

Sultan juga membangun jalan raya tembus dari Senapelan ke Teratak Buluh. Sultan Abdul Djalil Alamudin Syah membangun pasar, yang aktivitasnya hanya sepekan sekali. Belum sempat Senapelan berkembang, Sultan Abdul Djalil Alamuddin Syah wafat pada 1765 Masehi dan dimakamkan di samping mesjid Raya Pekanbaru, sekarang dengan gelar Marhun Bukit. Pasar pekan dilanjutkan oleh putranya Raja muda Muhammad Ali yang dibantu oleh ponakannya Said Ali (anak Said Usman). Di masa raja muda Muhammad Ali inilah Senapelan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasar yang di bangun yang pelaksanaannya hanya sekali sepekan melahirkan kata Pekanbaru. Pekan (berarti pasar sekali sepekan). Baru (baru dibangun saat itu). Sejak itula nama Senapelan lama kelamaan semakin menghilang, orang lebih banyak ,menyebut Pekanbaru.

Setelah Pekanbaru menjadi ramai maka muncullah para pendatang dari pelosok negeri, mulai dari minang Kabau, Pangkalan Kota Baru, Kampar, Taluk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuantan, Pasir Pengaraian, dan lain-lain. Awalnya mereka berdagang, lama kelamaan mereka menetap. Dengan menetapnya pedagang tersebut di Pekanbaru lalu mereka melahirkan generasi (anak,cucu,cicit). Anak, cucu dan cicit tersebut menjadi orang Pekanbaru. Masing-masing pedagang yang datang dan menetap di Pekanbaru membawa bahasa serta tradisi dari asal daerah mereka masing-masing. Lalu mereka wariskan kepada anak cucu dan cicit mereka. Dari situlah mulai kaburnya bahasa, tradisi asli Pekanbaru yang berasal dari kerajaan Siak. Atau nenek moyang mereka orang-orang yang hidup dalam lingkungan Kerajaan Siak.

#### 4.1.1 Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau sebagai permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini menteri dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menggapi maksud surat kawat tersebut, dengan openuh pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka bahan penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan keputusan surat Gubernur Kepala Daerah Swantatra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyidik Penetapan ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambilah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada menteri dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di Daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan. Perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

## **4.2 Keadaan Umum Kota Pekanbaru**

### **4.2.1 Keadaan Geografis**

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak ditengah-tengah Pulau Sumatra yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 00

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

25° – 00 45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km<sup>2</sup>. Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Siak; 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan; 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan; 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar; Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur Kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa. Maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu Kota tujuan masyarakat bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia.

### 4.3 Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah (lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintah di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan Pedagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat dilihat pada uraian berikut ini.

#### 4.3.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Pekanbaru

##### Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.

##### Misi

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
2. Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industry dan perdagangan
5. Menyediakan informasi industry dan perdagangan yang akurat
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen

#### 4.3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota Pekanbaru

##### 1. Tujuan

Misi Disperindag Kota Pekanbaru Di implementasikan dalam bentuk jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.
2. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
3. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global (Global Market)
4. Tercipta ADM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan perdagangan yang IPTEK
5. Terwujudnya pusat informasi dan peningkatan kerja sama industri dan perdagangan baik lokal, regional, maupun nasional

#### **4.3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru selanjutnya disingkat DISPERINDAG adalah instansi berkedudukan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Pemerintah di Pekanbaru. Sebagai instansi Pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industry dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan propinsi dan daerah
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan daerah/wilayah yang bersangkutan serta perizinan
3. Pelaksanaan kegiatan program sektor industry dan perdagangan dibidang program, sub dinas perlindungan konsumen
4. Konsultasi dengan pemerintah du Pekanbaru melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi/dinas terkait serta organisasi asosiasi dunia usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota
5. Pengawasan mutu dan memantauan penetapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
6. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka penasarana dalam negeri ekspor
7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industry dan perdagangan
8. Urusan tata usaha kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Menurut surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001, tentang susunan organisasi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terdiri dari:

1. Sub Dinas Tata Usaha
2. Sub Dinas Program
3. Sub Dinas Perindustrian
4. Sub Dinas Perdagangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sub Dinas Kerjasama
6. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**a) Sub Dinas Tata Usaha**

Mempunyai tugas mengkordinasikan, membina dan mengurumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan dengan urusan tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan/membina dan merumuskan rencana program kerja tahunan bagian Tata Usaha.
2. Mengkordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum, perlengkapan, investasi, kepegawaian serta keuangan.
3. Mengkordinasikan, membina dan merumuskan rencana anggaran dinas.
4. Sub Bagian Umum Perlengkapan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol serta kearsipan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

5. Sub Bagian Keuangan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai tugas merumuskan, membina dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dilingkungan, serta merumuskan kebijakan fasilitas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Sub Bagian Kepegawaian**

Mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas serta perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b) Sub Dinas Program**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan di bidang industri perdagangan dilingkungan kantor dinas dan perdagangan kota pekanbaru. Sub Dinas Program terdiri dari:

**1. Seksi Penyusunan Program**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana program dinas, pengawasan bimbingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Seksi Data dan Informasi**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan penyiapan informasi di bidang industry dan perdagangan.

**3. Seksi pengawasan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana dan program dilingkungan dinas perindustrian dan perdangan si Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas merumusan, membina dan melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan industriy dan perdagangan

**c) Sub Dinas Perinsustrian**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis pembinaan dan penyuluhan dunia usaha industri, pengembangan serta teknis pembinaan dan penyuluhan dunia usaha industri, pengembangan serta teknis pendidikan standar mutu industry. Sub Dinas Perindustrian terdiri dari;

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
2. Seksi Usaha Perindustrian
3. Seksi Iklim Usaha
4. Seksi Perlindungan

**d) Sub Dinas Perdagangan**

Mempunyai tugas mengkooordinasikan, membina dan merumuskan peningkatan dan pengembangan ekspor dan kegiatan impor serta evaluasi dan pelaporan. Sub Dinas perdagangan terdiri dari:

1. Seksi Usaha Perdagangan

Mempunyai tugas melaksanakan usaha perdagangan, monitoring bahan strategis, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi pendaftaran dan informasi perusahaan mempunyai tugas merumuskan pembinaan penertiban daftar perusahaan serta evaluasi dan pelaporan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi metrologi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan standar mutu, bimbingan, ukuran, arus panjang dan volume, serta koordinasikan pengendalian PPNS metrology.

**e) Sub Dinas Kerjasama**

Mempunyai tugas mengkoordinasi, membina, merumuskan dan peningkatan kerja sama industri, pengkajian, potensi daerah dibidang industri dan perdagangan serta evaluasi laporan. Sub Dinas Kerjasama terdiri dari :

**1. Seksi Pengkajian**

Mempunyai tugas dan melaksanakan rencana dan program pengkajian dalam rangka kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan.

**2. Seksi Perdagangan**

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana program koordinasi kerjasama di bidang industry serta evaluasi dan pelaporannya.

**3. Seksi Perdagangan**

Mempunyai tugas dan melaksanakan rencana dan program pengkajian koordinasi kerjasama di bidang perdagangan serta evaluasi dan pelaporan.

**f) Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian pembinaan dan perlindungan konsumen serta penyuluhan. Sub Dinas Pembinaan dan perlindungan terdiri dari :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Promosi dan Pembinaan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program promosi dan perlindungan usaha serta evaluasi dan pelaporannya.

2. Seksi Perlindungan Konsumen

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan dan program pembina dan pengawasan kebijaksanaan perlindungan konsumen.

3. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana program pendataan, pencegahan dan bimbingan teknis gangguan dampak lingkungan bagi perusahaan.

4. Seksi Penyuluhan

Mempunyai tugas yang merumuskan dan melaksanakan rencana dan program penyuluhan dan pelatihan sector industry dan perdagangan, evaluasi dan pelaporan.

**g) Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas dan melakukan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh seorang kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.



#### **4.4 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru**

##### **4.4.1 Latar Belakang Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan Pemerintah Umum Dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman dan tentram, tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dibidang Penyelenggaraan Pemerintah umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di Wilayah serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tugas dan tanggung jawab Pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, Pembina Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan dan tertulis, tindakan cegah dini atau pengatur jaga, pengawalan dan patroli. Disusunnya rencana penatapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sinergis dalam menyikapi Peraturan Daerah dan keputusan Walikota sehingga tercapailah kondisi Kota Pekanbaru yang kondusif.

#### 4.4.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun pemantapan kinerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor :32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pedoman umum SATPOL PP
3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang SATPOL PP
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor ; 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, fungsi, Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

#### 4.4.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pemantapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai haluan dan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Sedangkan tujuan disusunnya pemantapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah agar :

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.
2. Apatur Satuan Polisi Pamong Praja mentaati dan tidak melanggar ketentuan yang ada.
3. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas lebih mengedepankan rasa tentram, tertib, dan nyaman serta aman bagi masyarakat.

#### 4.4.4 Visi dan Misi SATPOL PP Kota Pekanbaru

##### Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Tentram adalah suatutatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undang sehingga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

**Misi**

“meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

**1. Fungsi SATPOL PP**

Dalam melaksanakan tugas SATPOL PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan PERDA. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan PERDA dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**2. Wewenang SATPOL PP**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang berikut :

- a. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru. SATPOL PP Kota Pekanbaru dikepalai oleh oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon IV diantaranya :

- a. Kasubag Tata Usaha
- b. Kasi Operasional
- c. Kasi Pembinaan dan Kapasitas
- d. Kasi PPNS

#### 4.4.5 Tugas Dari Masing – masing tersebut diatas adalah :

##### A. Kepala satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan umum, penegakan peraturan Daerah yang dan peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah.
2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentaman dan ketertiban umum di daerah.
3. Melaksanakan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala Daerah serta kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah.
4. Pengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS atau aparat lainnya.

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas
6. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :**

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan pelaporan.
2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
3. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
5. Merumuaskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggung jawaban keuangan.
6. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala kepala Satuan.
7. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
8. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program satuan.
10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Mewakili Kepala satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.
12. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan satuan.
13. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
14. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat, laporan tahunan evaluasi sebagai pertanggung jawaban satuan.
15. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
16. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing.
17. Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan.
19. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan.
20. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Operasional Mempunyai Tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
4. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, satuan kerja perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaaan.
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing.
7. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data dan laporan diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberi oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas Mempunyai Tugas

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kapasitas.
3. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
4. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Pembinaan dan pengembangan Kapsitas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
6. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi pembinaan pengembangan kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

E. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran perda dan Peraturan Walikota.
2. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan.
4. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS.
5. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing.
6. Melaksanakan monitorin, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
7. Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang penataan dan pemebinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa implementasi berhasil dilaksanakan dengan cara berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan pembinaan pedagang kaki Li di jalan HR. Soebrantas Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada kendala yaitu dalam menjalankan komunikasi terhadap pedagang kaki lima dan kesadaran Pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Adapun faktor penghambat implementasi peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR.Soebrantas adalah pertama, komunikasi yang diberikam terhadap masyarakat kurang intensitas dan kurannya pemahaman terhadap pedagang kaki lima. Kedua, yaitu sumber daya pada dinas terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mengalami hambatan dalam menegakan peraturan daerah yaitu kurangnya pekerja harian lepas yang juga mempengaruhi dedikasi pekerjaan mereka untuk menerapkan kebijakan



pemerintah, untuk turun ke lokasi sasaran. Ketiga, kurangnya transportasi Satuan Polisi Pamong Praja untuk turun ke lokasi sasaran sehingga faktor tersebut membuat kurangnya intensitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 6.2. Saran

Namun dalam keberhasilannya ini, ada hal yang harus diperhatikan lebih lagi. Hal ini menjadikan sedikit hambatan dalam implementasi Perda tersebut. Hal tersebut berupa :

### 1. Komunikasi

Komunikasi yang diberikan masyarakat harus dilakukan lebih sering intensitasnya, karena masyarakat banyak belum paham dengan kejelasan Perda tersebut, karena Perda tersebut juga melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### 2. Sumber Daya

Satpol PP mengalami hambatan dalam menegakan Perda tersebut. Hambatan yang dialami Satpol PP. Hambatan yang dialami Satpol PP yaitu jumlah PHL (Pekerja Harian Lepas) yang juga mempengaruhi dedikasi pada pekerjaan mereka



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edwandar, Bonni. 2017. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Pekanbaru)*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Efendi, Tadjuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Fakhrurrazi Ihsan. *Dimensi Politik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Jongkok Di jalan Hr. Soebrantas*. Volume 1.
- Febra A Nasution. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru*. Volume 3.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok – Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Bandung: Mandar Maju.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Moenir, R. 2000. *Migrasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Nugroho, D Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta : Gramedia.
- Nurul Fitria. 2016. *Konsisten Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Menjaga Ketertiban Umum (Studi kasus Pedagang Kaki Lima)*. Volume 3.
- Pajar Pangestu. 2017. *Implementasi Pengaturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru*. Volume 1.
- Pasalong, Harbaini. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus, Dyan Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik* : Penerbit Gava Media.
- Rholen Bayu Saputra. 2014. *Profil Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Badan Jalan*. Volume 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Safitri, Yosi. 2012. *Implementasi Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang penataan dan pembinaan di Pasar Senapelan (Pasar Kodim).* ). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Saputra, Dwi Hendra. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan H. Arif Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir).* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Satriani, Septi. 2016. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima ata Pedagang Malam di Kota Payakumbuh).* ). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung:CV.Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Administrasi.* . Bandung:CV.Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Negara.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Usman, Husaini. 2009. *Pengantar Statiska.* Yogyakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul S. 2005. *Mendemokratisasikan Kebijakan Publik di Daerah Via Analisi Kebijakan Publik Partisipatif.* Malang : FIA – Unibraw.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses.* Yogyakarta : Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses.* Yogyakarta : Media Pressindo.

UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto Bersama Sekretaris Dinas Satpol PP Pekanbaru**



**Foto Bersama Bapak Kepala Seksi Penyidik  
Dinas Satpol PP Pekanbaru**

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

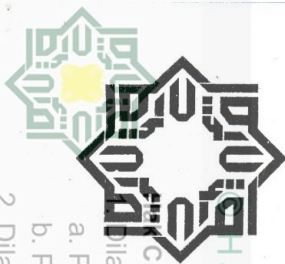
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



**Foto Bersama Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Pekanbaru**



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3603/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 05 Oktober 2020 M  
 17 Safar 1442 H

Kepada  
 Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Meta Desnora
NIM	: 11675200697
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



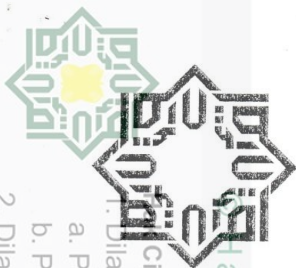
Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA  
 NIP. 19751112 199903 2 001

Cita diilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3491/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 28 September 2020 M  
10 Safar 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Meta Desnora  
NIM. : 11675200697  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan  
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima "** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Muh. Said HM, M.Ag, MM  
0512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Cipr diilindungi Undang-Undang

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/35617  
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3491/2020 Tanggal 28 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

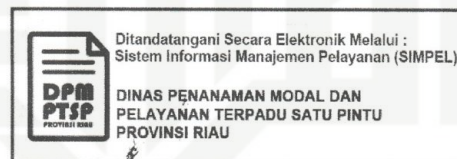
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | META DESNORA  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11675200697   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEKANBARU<br>2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU    |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2020



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/2212



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/35617 tanggal 2 Oktober 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : META DESNORA
2. NIM : 11675200697
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. MAHONI NO. 143 KEL. SIDOMULYO TIMUR KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU  
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Oktober 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.19750715 199311 1 001

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Teratai No. 83 Telp. (0761) 21669, 25174 Fax. (0761) 25174  
PEKANBARU - 28127

## SURAT KETERANGAN

NOMOR: 071/DPP- 1.1 / 1102

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No. 071/BKBP-SKP/2020/2212 Tanggal 15 Oktober 2020, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : META DESNORA  
NIM : 11675200697  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : S-1 ADMINISTRASI NEGARA

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan penelitian pada dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEGADANG KAKI LIMA"** pada bula November 2020,

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal: 24 November 2020

An. ~~Kepala Dinas~~ **Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**  
**Sekretaris,**

**Dra.Hj. YETTINIZA, M.Pd.**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19650604 198903 2 005**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jenderal Sudirman No. 464 Telp (0761) 31543 - 38765  
Pekanbaru - 28126



## SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/1095

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/2020/2212 Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : META DESNORA  
NIM : 11675200697  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : S.1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA"**

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluar agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 November 2020

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEKANBARU  
SEKRETARIS



**MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH**  
Pembina Tk.I NIP. 19640711 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.